



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan daerah/SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang



dilakukan oleh selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- (a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a) Laporan realisasi anggaran



- b) Neraca
- c) Catatan atas laporan keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
- k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

RAPBD 2016 disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amandemen keempat. Mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara penyusunan RAPBN 2016 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016, sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2016 beberapa waktu yang lalu. Proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan dan pembahasan RAPBN Tahun 2016, juga dilakukan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2016, Tema RKP Tahun 2016 adalah : “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Tema ini menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan tema tersebut, dalam RKP 2016 ditetapkan 11 prioritas nasional, yang terdiri atas : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Disamping itu, terdapat tiga prioritas lainnya, yaitu : (1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan tema RKP 2016 serta memperimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang lainnya akan ditekankan pada penanganan empat isu strategis. *Pertama*, peningkatan daya saing, melalui peningkatan iklim investasi dan usaha; percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. Langkah – langkah terobosan untuk itu, dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2016, dengan sasaran tahun 2016, yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 5,8 persen – 6,1 persen. *Kedua*, peningkatan daya tahan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2016, serta peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. *Ketiga*, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster I-IV. Langkah-langkah terobosan untuk sasaran ketiga



tersebut dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 2011 – 2025, dengan sasaran tahun 2016 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5 – 10,5 persen. *Keempat*, pemantapan stabilitas sosial politik melalui persiapan Pemilu 2016, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta percepatan pembangunan Minimum Essential Force.

Dengan memperhatikan besarnya tantangan yang dihadapi, kebijakan fiskal dalam tahun 2016 diarahkan untuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Arah kebijakan fiskal tersebut menekankan pentingnya mendorong stimulus fiskal yang terukur dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga APBN yang sehat dalam rangka mewujudkan kondisi fiskal yang berkesinambungan. Keseimbangan antara sasaran ini akan selalu melandasi kebijakan fiskal sekarang dan di waktu-waktu mendatang.

Upaya untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal tersebut, akan ditempuh melalui dua strategi pokok, yaitu mengendalikan defisit anggaran pada tingkat yang aman dan menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable. Sasaran tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya untuk mengembangkan secara optimal sumber-sumber pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim dunia usaha; selalu menjaga disiplin anggaran; dan dengan melaksanakan kebijakan pinjaman pemerintah yang *prudent*. Sementara itu, upaya untuk mendorong peran APBN sebagai stimulus pembangunan, akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif; menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada; memperlancar penyerapan anggaran; serta meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini serta prospeknya ke depan, kerangka ekonomi makro yang sekaligus menjadi asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan berbagai besaran RAPBN tahun 2016 adalah : (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen; (b) laju inflasi 4,9 persen; (c) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (d) nilai tukar Rupiah Rp. 9.300,- / US\$; (e) harga minyak mentah Indonesia US\$ 100 perbareil; serta (f) lifting minyak dan gas bumi Indonesia sebesar 2.260 ribu bareil setara minyak, yang meliputi lifting minyak bumi 900 ribu bareil perhari, dan lifting gas bumi yang mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar baru dalam RAPBN tahun 2016 sebesar 1.360 ribu bareil setara minyak per hari.

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, arah dan strategi kebijakan fiskal, serta upaya-upaya lain sebagai respon perkembangan terkonon, postur RAPBN 2016 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut :

- a. **Pendapatan negara** direncanakan Rp. 1.507,7 triliun, naik 11 persen dari target APBNP 2013. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp. 1.178,9 triliun, PNPB Rp. 324,3 triliun, dan penerimaan hibah Rp. 4,5 triliun. Dengan penerimaan perpajakan



tersebut, rasio penerimaan perpajakan (pusat) terhadap PDB (tax ratio) meningkat 11,9 persen dalam APBNP 2013 menjadi 12,7 persen dalam tahun 2015.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2016, kebijakan perpajakan akan diarahkan untuk melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan yang telah ditempuh dalam tahun-tahun sebelumnya. Fokus kegiatannya antara lain meliputi : (1) penyempurnaan kebijakan perpajakan, diantaranya dengan memperluas basi pajak, terutama pajak penghasilan, dan sekaligus memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah serta usaha kecil dan menengah; (2) peningkatan perbaikan penggalan potensi perpajakan, terutama atas sektor-sektor unggulan, dengan melanjutkan sensus pajak nasional; (3) penguatan aspek perpajakan internasional pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak; (4) pengembangan jaminan kualitas (quality assurance) dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak agar tercipta kepastian hukum; serta (5) penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Di bidang kepabeanan dan cukai akan terus dilakukan optimalisasi penerimaan, antara lain melalui penyesuaian tarif cukai dan ekstensifikasi barang kena cukai, serta peningkatan langkah-langkah untuk memperkecil kebocoran, meningkatkan pengawasan, serta pelayanan kepada para stakeholder.

Selanjutnya dibidang PNBPN, dalam tahun 2016 antara lain akan ditempuh pokok-pokok kebijakan : (1) peningkatan PNBPN migas dan nonmigas melalui langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas, yang didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan, terutama migas dan batubara; (2) optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, melalui peningkatan kinerja BUMN dengan melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan *good corporate governance* (GCG), dan melakukan sinergi antar-BUMN; serta (3) optimalisasi sumber-sumber penerimaan PNBPN yang berasal dari pelayanan jasa kementerian dan lembaga, melalui upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBPN, perbaikan administrasi PNBPN pada K/L, serta pengkajian ulang besaran tarif PNBPN yang berlaku pada setiap kementerian dan lembaga. Optimalisasi PNBPN tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu saat ini juga tengah dilakukan langkah-langkah untuk merevisi Undang-Undang PNBPN agar lebih sesuai dengan kondisi terkini dan dinamika perkembangan ekonomi ke depan.

- b. **Belanja Negara** direncanakan Rp. 1.657,9 triliun, naik Rp. 109,6 triliun atau 7,1 persen dari pagu APBNP 2013. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp. 1.139,0 triliun, dan transfer ke daerah Rp. 518,9 triliun.

Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas belanja, akan ditempuh langkah-langkah strategis yang meliputi antara lain : (1) meningkatkan anggaran modal untuk infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata; (2) menuntaskan pelaksanaan



program reformasi birokrasi dan tata kelola serta mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah; (3) memperkuat pelaksanaan program-program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4), dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung MP3KI; (4) meningkatkan efisiensi belanja subsidi melalui pengendalian konsumsi energi; serta (5) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2016.

Dalam rangka penurunan beban subsidi energi, khususnya subsidi listrik, dalam tahun 2016 direncanakan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara otomatis setiap triwulanan, dengan tetap memprioritaskan penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu dan golongan yang membutuhkan, serta memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan.

Dibidang transfer ke daerah, dilakukan kebijakan keberpihakan (*affirmative actions*) dalam pengalokasian DAK bagi daerah tertinggal/terluar, peningkatan alokasi DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, peningkatan dana penyesuaian khususnya alokasi dana tunjangan profesi guru PNSD, serta penyediaan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2).

Sejalan dengan itu, juga dilakukan upaya dan langkah khusus percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, antara lain melalui : (a) pengurangan angka kemiskinan; (b) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (c) pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan darat yang menembus pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah untuk membuka keterisolasian daerah; serta (d) peningkatan pelaksanaan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua di beberapa perguruan tinggi unggulan di luar Papua, di sejumlah instansi pemerintah yang strategis, pemagangan di berbagai instansi Pemerintah di luar Papua.

- c. Dengan rencana pendapatan negara Rp. 1.507, triliun, dan rencana belanja negara Rp. 1.657,9 triliun tersebut, **defisit anggaran** dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan Rp. 150,2 triliun, atau 1,62 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut turun dari target defisit anggaran dalam APBNP 2013 sebesar 2,23 persen terhadap PDB. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun masih tetap memberikan ruang bagi ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- d. **Pembiayaan anggaran** RAPBN tahun 2016 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri Rp. 169,6 triliun, dan pembiayaan luar negeri (netto) negatif Rp 19,4 triliun.

Kebijakan pembiayaan anggaran dilakukan dengan berorientasi pada pembiayaan yang berkelanjutan, serta dengan beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan



sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dengan langkah-langkah tersebut, rasio utang Pemerintah terhadap PDB diperkirakan menjadi 23 persen pada akhir tahun 2016. Rasio itu lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio utang pemerintah negara-negara berkembang lainnya. Hal itu mengindikasikan semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2016, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
6. Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan
7. Program Pembibitan, Pembinaan Dan Pemanduan Serta Pemasyarakatan Olahraga
8. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga
9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 adalah **Rp. 102.641.142.000,-** terbagi menjadi 9 Program dan 42 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. **96.031.023.926,-** atau 93,56% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.01

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.791.856.000	6.259.787.426		92.17	
1.18.01.0001.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000	18.190.890		93.29	
1.18.01.0209.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.418.000.000	1.019.395.268		71.89	
1.18.01.0833.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	75.000.000	74.572.000		99.43	
1.18.01.1041.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	2.277.000.000	2.247.114.000		98.69	
1.18.01.1249.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	71.648.600		95.53	
1.18.01.1457.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.500.000	67.212.756		99.57	
1.18.01.1665	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.452.000	22.452.000		100	
1.18.01.2081	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.050.000	23.504.500		83.80	
1.18.01.2289	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	13.970.000		99.79	
1.18.01.2705	Kegiatan Penyediaan Makanan	115.000.000	112.632.500		97.94	



	dan Minuman					
1.18.01.2913	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah	900.000.000	865.719.432		91.61	
1.18.01.3121	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.726.354.000	1.669.753.980		96.72	
1.18.01.3745	Kegiatan publikasi dan dokumentasi	54.000.000	53.621.500		99.30	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.02

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.650.748.000	4.220.232.365	90.74	87.06	
1.18.02.1665	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.216.156.000	1.187.847.800		97.67	
1.18.02.2081	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	332.894.000	266.066.465		79.93	
1.18.02.30.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	257.255.000	167.397.300		65.07	
1.18.02.4785	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	2.844.443.000	2.598.920.800		91.37	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.03

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000	59.625.000		99.38	
1.18.03.0001.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60.000.000	59.625.000		99.38	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.05

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	267.330.000	267.330.000		100	
1.18.05.0001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	135.000.000	135.000.000		100	
1.18.05.0417	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	132.330.000	132.330.000		100	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.24

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.24.	Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasarakan Olah Raga	17.775.159.000	16.945.271.550		95.33	
1.18.24.0002.	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	8.285.829.000	7.926.017.900		95.66	
1.18.24.0003.	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	5.416.077.000	5.017.022.250		92.63	
1.18.24.0004.	Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	345.550.000	345.550.000		100	
1.18.24.0005.	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	801.345.000	801.345.000		100	
1.18.24.0006.	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	2.926.358.000	2.855.336.400		100	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.25

Provinsi : Jawa Tengah



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.25.	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga	754.459.000	745.289.000		98.78	
1.18.25.0001.	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	505.055.000	503.385.000		99.67	
1.18.25.0002.	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	60.419.000	60.419.000		100	
1.18.25.0003.	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	82.985.000	82.985.000		100	
1.18.25.0004.	Kegiatan Pengembangan Industri Olahraga	106.000.000	98.500.000		92.92	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.26

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.26.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahraan	977.647.000	969.826.000		99.20	
1.18.26.0006	Kegiatan Pengembangan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	370.700.000	370.700.000		100	
1.18.26.0003	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	205.800.000	205.800.000		100	
1.18.26.0004	Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	401.147.000	388.286.000		96.76	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.27

Provinsi : Jawa Tengah



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.27.	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	366.761.000	364.871.000		99.48	
1.18.27.0001.	Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	366.761.000	364.871.000		99.48	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.28

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.28.	Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	2.988.109.000	2.942.268.000		98.47	
1.18.28.0001.	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda	555.294.000	519.609.000		93.57	
1.18.28.0002.	Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	1.300.000.000	1.300.000.000		100	
1.18.28.0003.	Kegiatan Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	159.169.000	159.169.000		100	
1.18.28.0004.	Kegiatan Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB	761.000.000	757.219.000		99.50	
1.18.28.0005.	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	212.646.000	206.271.000		97	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.29

Provinsi : Jawa Tengah



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.29.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	49.817.322.000	47.001.657.990		94.35	
1.18.29.0001	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	390.000.000	294.058.450		75.40	
1.18.24.0002	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	49.427.322.000	46.707.599.540		94.50	

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Jadwal kegiatan, menunggu dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia)



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.



Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
- e. Seluruh kekayaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2016 ;
- f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di sahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;



- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2016 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2016

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.046.289.500 atau 106.01% dari target 987.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah				
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
Jumlah				

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.046.289.500 atau 106.01% dari target 987.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	987.000.000	1.046.289.500	106.01	0
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah				

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari target dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor				
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Pajak Air Permukaan				
Jumlah				



5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari target dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah				

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari target dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
Jumlah				

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari target dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Jumlah				

5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari target dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek				
Retribusi Ijin Usaha Perikanan				
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)				
Jumlah				



5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari target dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain				
Jumlah				

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016. **BELANJA OPERASI**

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 96.032.266.196 atau 93.56% dari anggaran 102.641.142.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 54.856.788.365,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	22.218.648.000	20.143.396.551	90.66	18.834.477.237
Belanja Barang & Jasa	28.470.225.000	26.954.458.585	94.67	
Jumlah	50.688.873.000	47.097.855.136		

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 20.144.638.821 atau 90.66% dari anggaran 22.218.648.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 18.834.477.237 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	18.191.751.000	16.254.865.595		15.172.294.112
Belanja Pegawai langsung	4.026.897.000	3.888.530.956		3.662.183.125
Jumlah	22.218.648.000	20.144.638.821		18.834.477.237,00



5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 27.695.080.035 atau 94.47% dari anggaran 29.302.422.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 32.117.683.128 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	1.779.706.000,00	1.686.625.000,00	94,77	3.636.691.814,00
Belanja Bahan/Material	126.968.000,00	91.068.000,00	71,73	166.962.000,00
Belanja Jasa Kantor	7.371.426.000,00	6.758.634.182,00	91,69	3.759.157.500,00
Belanja Premi Asuransi	269.700.000,00	253.047.000,00	93,83	142.382.540,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	332.894.000,00	266.066.465,00	79,93	310.163.116,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	560.502.000,00	552.432.556,00	98,56	784.540.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.785.700.000,00	2.709.761.900,00	97,27	5.286.814.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	434.356.000,00	406.300.000,00	93,54	575.445.000,00
Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	281.560.000,00	280.510.000,00	99,63	634.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	7.402.151.000,00	7.149.642.550,00	96,59	8.890.945.600,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	149.000.000,00	148.471.000,00	99,64	87.400.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	481.610.000,00	475.635.000,00	98,76	1.143.573.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.354.301.000,00	2.166.947.832,00	92,04	2.539.278.808,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	288.000.000,00	283.500.000,00	98,44	134.800.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.473.411.000,00	1.355.245.100,00	91,98	923.682.750,00
Belanja Jasa Konsultasi	47.200.000,00	47.082.000,00	99,75	1.867.558.500,00
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	832.197.000,00	740.621.450,00	89,00	999.093.500,00
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.170.700.000,00	2.163.200.000,00	99,65	
Belanja Hadiah Barang	161.040.000,00	160.290.000,00	99,53	234.545.000,00
Jumlah	29.302.422.000,00	27.695.080.035,00	94,51	32.117.683.128,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 48.192.547.340 atau 94.27% dari anggaran 51.120.072.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 3.904.628.000. dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	1.006.464.000,00	899.899.800,00	89,41	2.814.479.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	49.038.608.000,00	46.352.147.540,00	94,52	656.378.000,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	45.171.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.075.000.000,00	940.500.000,00	87,49	388.600.000,00
Jumlah	51.120.072.000	48.192.547.340	94,27	3.904.628.000

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari anggaran dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar



5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 899.899.800,00 89.41% dari anggaran 1.006.464.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 2.814.479.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat		199.177.000		
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian		665.248.800		
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga		45.474.000		
Belanja Alat-alat Studio				
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah		899.899.800.00		

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 45.596.447.540 atau 94.43% dari anggaran 48.282.908.000 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	48.282.908.000.00	45.596.447.540.00	94.43	
Belanja Monumen				
Jumlah	48.282.908.000.00	45.596.447.540.00	94.43	

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari anggaran dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan				
Belanja Bangunan Air (Irigasi)				
Belanja Instalansi dan Jaringan				
Jumlah				

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar atau% dari anggaran dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :



	2016		%	2014
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan				
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan				
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah				

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

BELANJA MODAL BLUD DIRINCI SESUAI KATEGORI BELANJA MODAL ASET TETAP (FORMAT SAMA DENGAN FORMAT APBD DI ATAS)

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp101.654.142.000.00, sedangkan Tahun 205 sebesar Rp57.049.738.365.00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah		

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016. (DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2017)



NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2017)**

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2016 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2016. **(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2017 DILAMPIRKAN)**



NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2016. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2017)**

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum disetor ke Rekening Kas Daerah **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2017)**.

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			



	Jumlah		
--	--------	--	--

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2016.

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah		

Saldo Kas yang belum disetor dengan rincian :

NO	URAIAN	2016	2015
1	Pendapatan yang belum disetor		
2	Uang muka titipan pasien		
3	Sisa jamkesmas/jamkesda		
	Jumlah		

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah		



5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

Bank	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
JUMLAH				

5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

	2016	2015
Piutang Pajak		
Penyisihan Piutang Pajak		
Piutang Pajak Netto		
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi Netto		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Piutang Lainnya Netto		

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar oleh wajib pajak.. Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :**(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

2016	2015
------	------



		2016	2015
Pajak PKB			
Pajak PBBKB			
Pajak BBNKB			
Pajak APT			
Jumlah			

Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
2					
	Jumlah				

*** PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PAJAK**

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2016. Penyisihan PiutangPajak per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut

	2016		2015	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah				

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain piutang retribusi pelayanan kesehatan piutang askes pada Dinas Kesehatan, piutang pemakaian kekayaan daerah dan piutang tempat pelelangan ikan. PiutangRetribusi per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut**(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2016	2015
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)		
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Piutang DUKS		
Jumlah		



Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang Askes				
2	Piutang TPI				
3	Piutang Pemakaian Kayada				
4	Piutang Jasa Kepelabuhan				
5				
	Jumlah				

*** PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI**

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2016. Penyisihan PiutangRetribusiper 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut

	2016		2015	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah				

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Contoh piutang lainnya piutang pendapatan Pasien dan Askes pada RSUD/RSJD, pemanfaatan GOR Jatidiri, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. PiutangLainnyaper 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut **:(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2016	2015
Piutang Pasien pada RSUD/RSJD		
Piutang Askes pada RSUD/RSJD		
Piutang jasa Kepelabuhan		



Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri
Piutang Hasil Penjualan Aset
Piutang TGR
Piutang Bunga Deposito
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD

Jumlah

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2016. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut

	2016		2015	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah				

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Asuransi BMD		
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah		

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis		
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak		



Persediaan Pakaian Dinas/Kerja
Persediaan Makanan dan Minuman
Persediaan Hibah

Jumlah

CATATAN :

- pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	jumlah			

- khusus persediaan yang bersumber dari pusat atau pihak di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan secara spesifik dan dilampiri dengan Berita Acara penyerahan.

Penyerahan dari

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Obat-Obatan			
2	Makanan dan minuman			
3			
	jumlah			

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2016	Penambahan	Pengurangan	2015
1	Biro Perekonomian -UMKM -Pembangunan Gd. BPR-BKK				
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				



No	Uraian	2016	Penambahan	Pengurangan	2015
	Dana Bergulir Sapi Kereman				
3	Dinas Koperasi dan UKM Dana Bergulir UKM				
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dana Bergulir Penempatan TK ke LN				
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dana Bergulir IKM				
6	Dinas Kehutanan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat				
7	Badan Ketahanan Pangan Dana Dergulir Kelompok Tani (Gerbang Mapan)				
	Jumlah				

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih. Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

- menunggak 1-2 tahun
- menunggak 2-3 tahun
- menunggak 3-5 tahun
- menunggak lebih dari 5 tahun

Jumlah

2016		2015	
Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih



5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar 171.075.276.406 naik/turun sebesar 132.488.887.215.16 atau 578.99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 34.420.069.075 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 34.420.069.075
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 48.192.547.320
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp 465.300.000
Mutasi Masuk	Rp 88.205.817.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 44.485.734.868
Jumlah	Rp 181.349.399.208
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 208.374.878
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp 44.485.734.868
Jumlah	Rp 208.374.0878
Grand Total	Rp 171.075.276.405

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2016.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.



- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

CATATAN : untuk SKPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar 50.948.948.500 naik/turun sebesar 73.720.000.000 atau 704% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 7.228.948.500 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Tanah	50.948.948.500.00	43.720.000.000.00		7.228.948.500.00
Jumlah	50.948.948.500.00	43.720.000.000.00		7.228.948.500.00

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 7.228.948.500
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 43.720.000.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 50.948.948.500



Berkurang

Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp

Grand Total Rp 50.948.948.500

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar 14.306.004.475 naik/turun sebesar 3.053.724.800 atau 127.31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 11.252.279.675 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Berat	3.360.091.000.00	786.552.000.00		2.249.539.000.00
Alat Angkut	3.125.407.156.00	477.300.000.00		2.648.107.156.00
Alat Bengkel dan Ukur				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.267.135.817.00	3.715.603.678.00	2.960.154.878.00	5.511.687.017.00
Alat Studio dan Komunikasi	891.570.502.00	52.307.000.00	3.683.000.00	842.946.502.00
Alat Kedokteran	940.500.000.00	940.500.000.00		
Alat Laboratorium	45.300.000.00	48.983.000.00	3.683.000.00	45.300.000.00
Alat Keamanan				
Jumlah	14.306.004.475.00	6.021.245.678.00	2.967.520.878.00	11.252.279.675.00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.252.279.675
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 1.850.399.800
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp 465.300.000
Mutasi Masuk	Rp 2.759.146.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 946.399.978
Jumlah	Rp 6.021.245.678

Berkurang

Ekstrakontable	Rp 208.374.878
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 208.374.878

Grand Total Rp 14.306.004.475



5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar 102.028.352.431 naik/turun sebesar 86.874.221.131 atau 673% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 15.154.131.300 dengan rincian sebagai berikut :

	2015	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung	101.395.402.840.00	128.233.069.540.00	41.726.671.000.00	14.889.004.300.00
Monumen	632.949.591.00	367.822.591.00		265.127.000.00
Jumlah	102.028.352.431.00	128.600.892.131.00	41.726.671.000.00	15.154.131.300.00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 15.154.131.300
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 44.885.177.540
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 41.726.671.000
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 41.989.043.591
Jumlah	Rp 128.600.892.131
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp 41.726.671.000
Jumlah	Rp 41.726.671.000
Grand Total	Rp 102.028.352.431

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar 1.582.186.409 naik/turun sebesar 1.301.627.409 atau 563.94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 280.559.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Jalan dan Jembatan	717.427.818.00	717.427.818.00		
Bangunan Air/Irigasi	51.080.091.00	5.909.091.00		45.171.000.00
Instalasi	225.454.455.00	188.872.455.00		36.582.000.00
Jaringan	198.806.000.00	389.418.045.00		198.806.000.00
Jumlah	1.582.186.409.00	1.301.627.409.00		280.559.000.00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**



Saldo Awal	Rp 280.559.000
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 1.301.627.409
Jumlah	Rp 1.031.627.409
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 1.582.186.409

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar 752.814.590 naik/turun sebesar 248.663.990 atau 149.32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 504.150.600 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Buku Perpustakaan	46.854.600.00			46.854.600.00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	705.959.990.00	248.663.990.00		457.296.600.00
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	752.814.590.00	248.663.990.00		504.150.160.00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 504.150.160
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 248.663.990
Jumlah	Rp 752.814.590
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp



Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 752.814.590

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar 1.456.970.000 naik/turun sebesar 1.456.970.000 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
	1.456.970.000.00			
Jumlah	1.456.970.000.00			

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan

Kolom 2 diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP

Kolom 3 diisi dengan lokasi terjadinya KDP

Kolom 4 diisi dengan nomor kontrak KDP

Kolom 5 diisi dengan nilai kontrak KDP

Kolom 6 diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak)

Kolom 7 diisi dengan realisasi KDP

Kolom 8 diisi dengan prosentase pembangunan.

Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp
Penambahan	



Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar 10.926.559.562,68 naik/turun sebesar 4.166.320.114,84 atau 953,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 6.760.239.447,84 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar	1.002.614.875.000	623.478.500.00
Alat Angkut	1.999.524.656.00	1.660.377.349.50
Alat Bengkel		4.530.000.00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.953.813.016.00	3.065.944.238.00
Alat Studio dan Komunikasi	506.935.701.20	357.101.300.80
Alat Kedokteran		188.100.000.00
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung	3.058.923.776.98	1.029.908.989.54
Monumen	121.783.491.82	5.793.520.00
Jalan dan Jembatan	48.804.621.80	
Bangunan Air dan Irigasi	3.159.127.28	1.505.700.00
Instalasi	8.734.548.50	1.219.450.00
Jaringan	29.635.748.10	14.910.450.00
Jumlah	10.926.559.562.68	6.760.239.447.84

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Aset Dikerjasamakan		



	2016	2015
Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
	2016	2015
Barang Rusak Berat		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
Jumlah Aset Lainnya		

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar **(Aset yang dikerjasamakan untuk dijelaskan secara rinci, antara lain memuat jenis aset yang dikerjasamakan dan perjanjian kerjasama)**

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesar 127.550.400 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 127.550.400 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	121.696.900.00	121.696.900.00
Alat Studio dan Komunikasi	5.012.500.00	5.012.500.00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Buku Perpustakaan		
Barang Bercork Kebudayaan	841.000.00	841.000.00
Hewan dan Tumbuhan		



	2016	2015
Jumlah	127.550.400.00	127.550.400.00

CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesardengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Jumlah		

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar



5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimukaper 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesarmerupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2016

5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanjaper 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar**(dijelaskan secara rinci jenis belanja yang kurang bayar)**

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnyaper 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD dengan rincian sebagai berikut :

Catatan :Utang Jasa Pelayanan diberi penjelasan pelunasan atas utang tersebut pada Tahun 2017

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Utang Bagi Hasil Pajakper 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesardengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pajak Kendaraan Bermotor		
Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan Tanah		
Jumlah		

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitasper 31 Desember 2016 sebesar 65.227.291.449.65 naik/turun sebesar 94.541.145.387.49 atau 222% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar (29.313.853.937.84)

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016.Pendapatan-LOper 31 Desember



2016 sebesar 1.046.289.500 naik/turun sebesar 1.046.289.500 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Asli daerah	1.046.289.500.00	
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
Jumlah	1.046.289.500.00	

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
Jumlah		

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pajak Kendaraan Bermotor		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan		
Jumlah		

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar 1.046.289.500 naik/turun sebesar 1.046.289.500 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Jasa Usaha	1.046.289.500.00	
Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	1.046.289.500.00	

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		



	2016	2015
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
Jumlah		

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2016 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016 sebesar 52.017.542.467.51 naik/turun sebesar 3.399.022.633.81 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 55.416.565.098.32

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar 52.017.542.467.51 naik/turun sebesar 3.399.022.633.81 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 55.416.565.098.32

	2016	2015
Beban Pegawai	20.143.396.551.00	18.834.477.237.00
Beban Barang & Jasa	27.707.825.801.67	34.305.512.194.67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.166.320.114.84	2.006.601.636.65
Beban Lainnya		269.974.030.00
Jumlah	52.017.542.467.51	55.416.565.098.32

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar 20.143.396.551 naik/turun sebesar 1.308.919.314 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 18.834.477.237

	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	16.254.865.595.00	15.172.294.112.00
Beban Pegawai Langsung	3.888.530.956.00	3.662.183.125.00
Jumlah	20.143.396.551.00	18.834.477.237.00



5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2016 sebesar 27.707.825.801.67 naik/turun sebesar6.597.686.393 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 34.305.512.194.67

	2016	2015
Beban Persediaan	11.009.152.156.00	15.709.280.814.00
Beban Jasa	10.463.714.248.67	12.260.811.706.67
Beban Pemeliharaan	1.621.311.565.00	1.233.845.866.00
Beban Perjalanan Dinas	2.166.947.832.00	2.539.278.808.00
Beban Barang & Jasa Lainnya	2.446.700.000.00	2.562.295.000.00
Jumlah	27.707.825.801.67	34.305.512.194.67

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar 4.166.320.114.84 naik/turun sebesar2.159.718.475 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 2.006.601.636.65

	2016	2015
Beban Penyusutan Aset Tetap	4.166.320.114.84	1.879.051.239.65
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		127.550.400.00
Jumlah	4.166.320.114.84	2.006.601.636.65

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lainper 31 Desember 2016 sebesar 0 naik/turun sebesar 269.974.030 atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar .269.974.030

	2016	2015
Beban Penyisihan Piutang		
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen		
Beban Hibah Aset Tetap		269.974.030.00
Beban Lain lain		
Jumlah		269.974.030.00

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

- Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini contohnya barang yang diusulkan penghapusan sebesar Rp5.000.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000.000,00 maka selisihnya Rp1.000.000,00 dicatat pada sebagai defisit Pelepasan Aset Non Lancar.
- Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar.Lampiran perincian sebagai berikut :



No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Penerimaan Pendapatan Sesuai STS	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
1	Komputer	3.000.000	2.000.000	1.000.000	200.000	(800.000)
2	Kendaraan	50.000.000	50.000.000	0	25.000.000	25.000.000
	jumlah					

CATATAN : pengisian tabel di atas menggunakan SK Penjualan Aset Tetap dan STS Penerimaan Pendapatan

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Visi :
“Terwujudnya Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi dan Berdaya Saing Dalam Pembentukan Karakter Bangsa”

Misi :

1. Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Guna Menghadapi Tantangan Global;
2. Meningkatkan Peran Lembaga Kepemudaan Dalam Rangka Pemberdayaan Pemuda;
3. Mengembangkan Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Yang Visioner Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pemuda;
4. Menumbuhkembangkan Budaya Olahraga di Masyarakat Dengan Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga;
5. Meningkatkan Budaya Sehat dan Kesegaran Jasmani Melalui Kegiatan Olahraga;
6. Meningkatkan Peran Lembaga dan Tenaga Keolahragaan dan Mengembangkan IPTEK Keolahragaan;
7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga Untuk Mendukung Prestasi dan Terciptanya Masyarakat Olahraga.



Bab VII Penutup

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2016.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2016 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2016, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.